PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA WANITA PADA MALAM HARI DI PT EMBEE PLUMBON TEKSTIL

Asep Sholeh Fakhrol Insan¹, Syamsudin², E Sugianto³
^{1,2,3}Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon
asepsholeh2@gmail.com

ABSTRACT

The role of law in life is as a container of protection that provides a sense of security, peace and order to achieve peace and justice for everyone. One form of protection for national builders is the existence of regulations governing employment. The purpose of labor protection is to ensure the continuity of a harmonious labor relations system without any pressure from the strong to the weak. Women labor is part of the workforce that performs a job, either for themselves or working in an employment relationship or under orders either from employers or other legal entities. Development of employment needs to be directed to the creation of harmony between employers and workers imbued with Pancasila and the 1945 Constitution, where the parties respect and respect each other and understand each other's rights and obligations in the sustainability of the production process and participation in human resource development. The results of this study conclude that the protection of women's labor according to Law Number 13 of 2003 already covers the main matters regarding the rights that must be given to women, especially in the reproductive sector. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has so far not harmed women's rights specifically. The implementation of protection of women workers at PT Embee Plumbon Tekstil, which includes: first, Equal employee benefits. Secondly, the issue of payment of wages. Third, menstrual leave. Fourth, maternity leave. Fifth, protection of child labor. Sixth, work time and rest hours. Seventh, occupational health and safety (K3).

Keywords: Legal Protection, Women Workers and PT. Embee Plumbon Textiles

ABSTRAK

Peranan hukum di dalam kehidupan adalah sebagai wadah perlindungan yang memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap orang. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pembangun nasional adalah adanya regulasi yang mengatur tentang ketegakerjaan. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa ada tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah baik itu dari pengusaha atau badan-badan hukum lainnya. Pembinaan terhadap ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk terciptanya keserasian antara pengusaha dan tenaga kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana para pihak saling menghargai dan menghormati serta saling mengerti peranan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keberlangsungan proses produksi serta partisipasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Perlindungan tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mencakup hal-hal pokok berkenaan dengan

hak-hak yang wajib diberikan kepada perempuan terutama bidang reproduksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejauh ini belum merugikan hak-hak perempuan secara spesifik. Pelaksanaan perlindungan pekerja wanita di PT Embee Plumbon Tekstil, yaitu meliputi: pertama, Persamaan imbalan kerja. Kedua, masalah pembayaran upah. Ketiga, cuti haid. Keempat, cuti melahirkan. Kelima, perlindungan pekerja anak. Keenam, waktu kerja dan jam istirahat. Ketujuh kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita dan PT. Embee Plumbon Tekstil*

A. Pendahuluan

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat di maknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras suku, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk pelaku yang sama terhadap tenaga kerja penyandang cacat.

Peranan hukum di dalam kehidupan adalah sebagai wadah perlindungan yang memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap orang. Hukum seyogyanya memberikan keadilan karena tujuan hukum diantaranya adalah

terwujudnya keadilan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pembangun nasional adalah adanya regulasi yang mengatur tentang ketegakerjaan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok secara menyeluruh di semua sektor. Program-program pembangunan sektoral maupun regional harus mengusahakan terciptanya kesempatan kerja sebanyak-banyaknya dengan imbalan upah yang sepadan.

Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah baik itu dari pengusaha atau badan-badan hukum lainnya. Alasan perempuan terjun ke dalam dunia kerja antara lain karena kebutuhan yang semakin meningkat serta keinginan untuk mengkualifikasi diri dengan kemampuan yang dimiliki.

Namun apapun alasannya seorang wanita bekerja itu adalah hal yang wajar dan diperbolehkan serta memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada banyak pihak secara langsung atau tidak langsung.

Pembinaan terhadap ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk terciptanya keserasian antara pengusaha dan tenaga kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana para pihak saling menghargai dan menghormati serta saling mengerti peranan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keberlangsungan proses produksi serta partisipasi dalam pembangunan sumber daya manusia.

Di Indonesia, peraturan terkait ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang ini ketenagakerjaan diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah diubah dengan regulasi baru mengenai cipta kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini

diketahui telah mencabut dan mengubah beberapa regulasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Disahkannya UU Cipta Kerja menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, UU ini ditakutkan akan merampingkan aturan-aturan yang sebelumnya menjadi payung hukum bagi tenaga kerja. UU Cipta kerja memuat pasal-pasal yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan mencabut beberapa poin penting sebagai jaminan hak tenaga kerja terlebih tenaga kerja perempuan.

Berdasarkan permasalahan itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Penerapan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Wanita Pada Malam Hari di PT Embee Plumbon Tekstil”***.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik

dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan peneliti ingin mengetahui pelaksanaan sebuah aturan yakni Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut.

Subyek data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sumber data adalah beberapa sumber atau informan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data itu digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek penelitian atau sumber data yang diperoleh oleh peneliti.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis maka metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan melakukan penilaian terhadap data-data dengan bantuan literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan

pekerjaan, antara lain yang bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang bersekolah dan orang yang mengurus rumah tangga. Adapun pengertian tenaga kerja yang lain, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja perempuan merupakan pekerja yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dan tersendiri, karena memang pada kenyataannya dalam beberapa perbedaan antara pekerja/buruh perempuan dengan pekerja laki-laki yang tidak dapat dipersamakan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perempuan yang dimaksud adalah perempuan dewasa yang berarti perempuan yang berumur delapan belas tahun termasuk orang yang belum dewasa atau anak-anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di

bidang ketenagakerjaan. Sedangkan menurut Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan adalah pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pihak pengusaha yang akan memperkerjakan pekerja/buruh perempuan dalam perusahaannya hendaknya mempertimbangkan dengan bijaksana hal-hal sebagai berikut:

- a. Kaum perempuan pada umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun.
- b. Norma-norma susila harus diutamakan, agar pekerja/buruh perempuan tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan negative dari pekerja lawan jenisnya, terutama jika diperkerjakan malam hari.
- c. Para pekerja perempuan pada umumnya mengerjakan pekerjaan harus sesuai dengan sifat dan tenaganya.
- d. Para pekerja /buruh perempuan itu ada yang masih gadis dan adapula yang telah bersuami atau

berkeluarga dengan sendirinya mempunyai beban rumah tangga yang harus ditanggungnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pada umumnya perempuan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak memerlukan kerja otot.

Setiap orang memiliki hak, tidak terkecuali tenaga kerja juga memiliki hak. Namun untuk mendapatkan hak tersebut, tenaga kerja harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja terlebih dahulu”tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak”.

Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja
- b. Norma kesehatan kerja, yang meliputi pemeliharaan dan pentingnya drajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obatobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.
- c. Norma kerja, yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama, kewajiban sosial

kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara keagairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi

Resiko kerja pada malam hari lebih besar dari pada kerja pada siang hari, terlebih pekerjaan pada malam hari tersebut dilakukan oleh perempuan. Perempuan. dalam hal ini tidak bisa disamakan oleh laki-laki, karena resiko pekerjaannya lebih besar dan berlipat ganda. Maka dari itu perempuan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan lebih jika dipekerjakan malam hari. Pada bab X Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketanagakerjaan telah diatur mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejateraan dari tenaga kerja. Khususnya merujuk pada pasal 76 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan.

Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut, pekerja wanita berhak mendapatkan cuti haid

selama 2 hari pada saat mengalami haid, dengan ketentuan:

1. Pekerja wanita tersebut merasakan sakit pada masa haidnya.
2. Pekerja wanita harus memberitahukan kepada pengusaha/pemberi kerja bahwa dirinya sedang haid dan merasakan sakit.
3. Pada hari pertama dan kedua haid, pekerja wanita tidak wajib bekerja/mendapat cuti.

Hak cuti 2 hari ini diberikan dengan mempertimbangkan kondisi pekerja wanita yang biasanya mengalami rasa tidak nyaman/sakit pada awal masa haid. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti haid ini dapat diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT Embee Plumbon Tekstil, mengenai mekanisme cuti, terkhusus cuti dua hari pertama haid menyebutkan bahwa perusahaan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa ada diberikannya cuti bagi pekerja perempuan pada hari pertama dan hari kedua menstruasi. Namun perusahaan sesuai dengan surat keputusannya memberikan cuti sakit

tanpa pemotongan gaji asalkan ada laporan atas ketidakhadiran pekerja secara umum, baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan analisa yang saya miliki hingga Agustus 2023, tidak ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum pekerja wanita di Indonesia. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah mengatur perlindungan bagi pekerja wanita, antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- Pasal 76 mengatur larangan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.
- Pasal 81 mengatur kewajiban pengusaha memberikan kesempatan cuti haid bagi pekerja/buruh wanita.
- Pasal 82 mengatur larangan mempekerjakan wanita hamil yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dirinya sesuai keterangan dokter kandungan.
- Pasal 83 mengatur kewajiban pengusaha memberikan waktu

istirahat kepada pekerja/buruh wanita untuk menyusui anaknya.

Terkait dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan PT Embee Plumbon Tekstil itu telah mentaati peraturan tersebut diantaranya, tidak ada pekerja di bawah umur 18 tahun, kemudian tidak adanya pekerja perempuan dalam keadaan hamil yang dapat membahayakan kandungannya, memberikan makanan dan minuman bergizi saat bekerja, ada security yang menjaga saat bekerja, dan diberikan hak cuti haid untuk tenaga kerja perempuan.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mencakup hal-hal pokok berkenaan dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada perempuan terutama bidang reproduksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja, sejauh ini belum merugikan hak-hak perempuan secara spesifik mengingat Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengubah beberapa pasal pokok dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak menyangkut dengan perlindungan perempuan. Regulasi perlindungan pekerja perempuan masih kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

2. Pelaksanaan perlindungan pekerja wanita di PT Embee Plumbon Tekstil, yaitu meliputi: pertama, Persamaan imbalan kerja. Kedua, masalah pembayaran upah. Ketiga, cuti haid. Keempat, cuti melahirkan. Kelima, perlindungan pekerja anak. Keenam, waktu kerja dan jam istirahat. Ketujuh kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Tujuan dari adanya perlindungan pekerja ini adalah agar hak dan kewajiban pekerja dapat terpenuhi. Selain itu dimungkinkan dapat terhindar dari sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh pengusaha selaku atasan terhadap tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Dyah Permata Budi Asri. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
- Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu8ad0e0e7.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19:58.
- Evi Deliana Hz, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2016
- Ghufron A.Masadi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- H.R Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi, Cetakan ke-3*, Jakarta: Restu Agung, 2009
- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 2015
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Jimmy Joses Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja*, Jakarta: Visimedia, 2016
- Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013
- Jum Anggraini. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016
- Kartasapoetra, G, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan*

- Perempuan, Bandung: PT Grafika Aditama, 2014
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* Jakarta: Pradnya Pramita, 2004
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Muchtar Rosyidi, *Penuntutan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2006
- Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Makasar: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasiyah As-Sindi, Juz 2*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t
- Mustafa Husni As Sibal, *Al-Istikharah Al-Islam Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1982
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Prinst, Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- R. Indiarso dan Mj. Saptemo, *Hukum Perburuhan: Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Surabaya: Karunia, 1996
- Rhona K. M Smith, *Hukum Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soepomo dalam Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*,

- Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metodolgi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kombinasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2004
- Syahputra Iman, *Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang perlindungan Hukum
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Zaenal Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Zainal Asikin, Dkk, *Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Jurnal :**
- A.A Sagung Istri Ristanti, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*, Jurnal Kerta Semaya Vol 5 No 2 2017
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, T.tp
- Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Juz 2*, Daarul Fikr, Ttp
- Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qoswani, *Sunan Ibnu Majah*, Baeirut Lebanon: Dar El Fikr hadist ke 2443
- Agusfian Wahab, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al- Ma'rif, 1987
- Alaysuis Uwiyono, *Assa-asas Hukum Perburuhan*, Edisi 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014
- Ali Abdul Wafi, *Huququul Insaan Fil Islam Al-Wajidy*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991
- Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam", diakses dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/284/255> pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 19:53.
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016

Luthvi Febryka Nola, *Upaya
Pelindungan Hukum Secara
Terpadu Bagi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI)*. Jurnal Negara
Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016